



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO **TAHUN 2025**





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2026

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Plt. Inspektur Daerah

Kabupaten Sukoharjo



Suyadi Widodo, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP 19720627 199203 1 005

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban berbentuk laporan kinerja yaitu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Sekretaris Daerah



Abdul Haris Widodo

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki Tujuan “**Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel**” dan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” dan “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**”.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam mencapai target tujuan dan sasaran strategis, pada tahun 2025 telah disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang memuat **Indikator Sasaran Strategis 1**: Cakupan perumusan dan pengendalian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat target 100% terealisasi 121,21% dengan capaian 121,21% (Sangat Tinggi); Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan target 100% terealisasi 101,25% dengan capaian 101,25% (Sangat Tinggi); Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100% (Sangat Tinggi). **Indikator Sasaran Strategis 2**: nilai SAKIP dengan target 79 dan realisasi belum ada data (n/a) karena belum dilakukan Evaluasi SAKIP. Adapun **Indikator Tujuan**: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84 terealisasi 86,37 dengan capaian 102,82% (Sangat Tinggi). Sedangkan untuk indikator Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Nilai AKIP belum dirilis oleh Ombudsman RI dan Kementerian PANRB. Indikator Tujuan dan Sasaran bisa tercapai didukung oleh Adanya koordinasi lintas sektoral antara lain dengan instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi serta seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo didukung 3 program dengan jumlah anggaran Rp 81.473.522.900,00 serta realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 76.399.712.075,- (93,77%). Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,23% (enam koma dua puluh tiga persen).

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	1
B.    Tupoksi Organisasi.....	3
C.    Aspek Strategis Organisasi .....	4
B.    Isu Strategis.....	5
C.    Sistematika Penulisan .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A.    Perencanaan Strategis .....	7
B.    Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A.    Metode Pengukuran Kinerja .....	13
B.    Capaian Kinerja Organisasi .....	14
C.    Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi.....	44
D.    Analisis Efisiensi Sumber Daya Non Keuangan .....	45
E.    Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan .....	51
F.    Capaian Indikator Kinerja.....	58
G.    Penghargaan.....	62
BAB IV PENUTUP.....	64
A.    Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Sekretariat Daerah .....	64
B.    Saran.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1	Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 berdasarkan Golongan .....	3
Tabel II.A.1	Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	7
Tabel II.A.2	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo .....	9
Tabel II.B.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	12
Tabel III.A.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	14
Tabel III.B.1	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel .....	14
Tabel III.B.1.1	Capaian Kinerja pada Tahun 2025 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah .....	18
Tabel III.B.1.2	Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.....	19
Tabel III.B.1.3	Capaian Kinerja Kegiatan Bagian Hukum Tahun 2025 .....	22
Tabel III.B.1.4	Capaian Program Perekonomian Dan Pembangunan Tahun 2025 .....	26
Tabel III.B.1.5	Capaian Kinerja Kegiatan Bagian PBJ Tahun 2025 .....	29
Tabel III.B.1.6	Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 .....	33
Tabel III.B.1.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah .....	39
Tabel III.B.1.8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah .....	40
Tabel III.B.2.1	Capaian Kinerja pada Tahun 2025 Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .....	41
Tabel III.B.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .....	41
Tabel III.B.2.3	Perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lain .....	43

Tabel III.C.1	Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi .....	44
Tabel III.D.1	Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.....	45
Tabel III.D.2	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Koreksi	46
Tabel III.D.3	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMPOK ..	48
Tabel III.D.4	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan SI EMON BANGUN .....	49
Tabel III.D.5	Tingkat Efisiensi .....	52
Tabel III.E.1	Capaian Indikator Kinerja .....	58

## DAFTAR GRAFIK

Gambar III.B.1	Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 .....	16
Gambar III.B.2	Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 .....	17
Gambar III.B.3	Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 .....	44
Gambar III.F.1	Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah .....	55
Gambar III.F.2	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik .....	56
Gambar III.F.3	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Kecamatan, sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

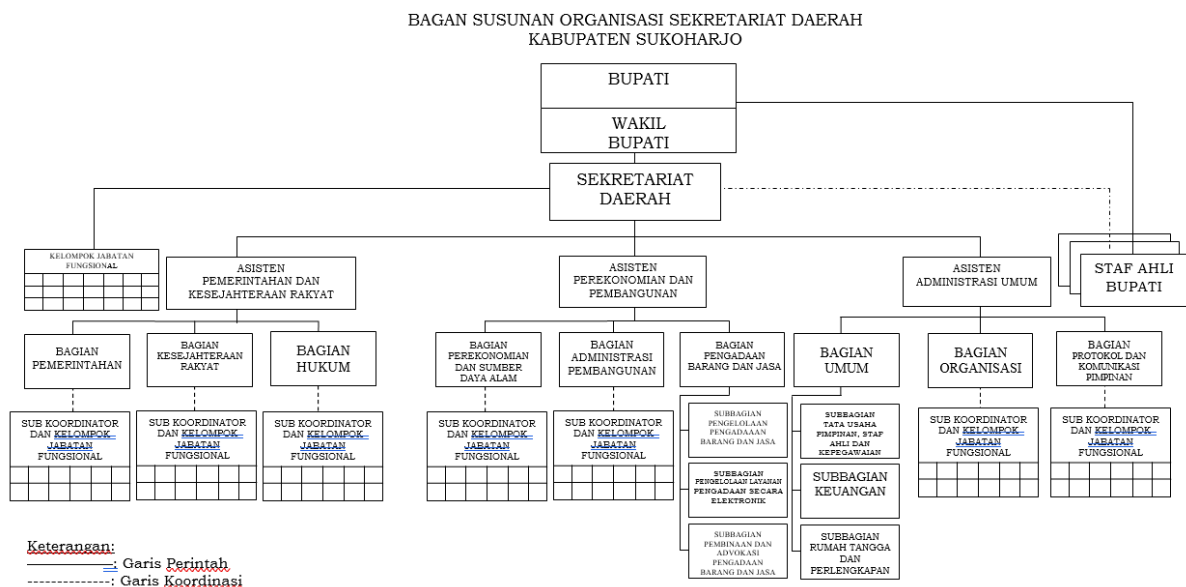
#### **2. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku koordinator atas:
  - 1) Bagian Pemerintahan terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
    - b) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
    - c) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;
    - b) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial; dan
    - c) Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.
  - 3) Bagian Hukum terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Perundang-undangan;
    - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
    - c) Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku koordinator atas:
  - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
    - b) Sub Koordinator Perekonomian; dan

- c) Sub Koordinator Sumber Daya Alam.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
  - a) Sub Koordinator Penyusunan Program;
  - b) Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
  - c) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
  - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum selaku koordinator atas:
  - 1) Bagian Umum terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Keuangan; dan
    - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - 2) Bagian Organisasi terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
    - c) Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Protokol;
    - b) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan; dan
    - c) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan.

### 3. Bagan Struktur Organisasi



Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah aparatur sipil negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

**Tabel I.A.1**  
**Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025**  
**berdasarkan Golongan**

No	BAGIAN	IV/ d	IV/ c	IV/ b	IV/ a	III/ d	III/ c	III/ b	III/ a	II/ d	II/ c	II/ b	II/ a	- (PPPK)	Jumla h
1	Umum		5	2		1	4	3	9	3	4	2	1	14	<b>48</b>
2	Perekonomian dan SDA			1	1	3	1	1			1			4	<b>12</b>
3	Administrasi Pembangunan				1	3			2					4	<b>10</b>
4	Prokopim			1		1		3	1		3			9	<b>18</b>
5	Kesejahteraan Rakyat				2	1	3	2	1		2			2	<b>13</b>
6	Hukum				1	3		2	2		1			4	13
7	Pemerintahan			1	1	2			3	1				1	<b>9</b>
8	PBJ			1		3	5	6	1					3	<b>19</b>
9	Organisasi			1		3		5	2					3	<b>14</b>
	Jumlah	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>156</b>

Sumber: Bagian Umum Setda

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah ASN sebanyak 156 orang yang terdiri dari Bagian Umum 48 orang, Bagian Perekonomian dan SDA 12 orang, Bagian Administrasi Pembangunan 10 orang, Bagian Prokompim 18 orang, Bagian Kesejahteraan Rakyat 13 orang, Bagian Hukum 13 orang, Bagian Pemerintahan 9 orang, Bagian PBJ 19 orang, dan Bagian Organisasi 14 orang.

## B. Tupoksi Organisasi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
3. penyelenggaraan kebijakan daerah;
4. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;

5. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
7. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dipengaruhi berbagai pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh pada pencapaian Tujuan Organisasi apabila tidak teridentifikasi dan dikelola dengan tepat. Adapun Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Lingkungan Internal
  - a. Kekuatan Organisasi
    - 1) Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam angka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
    - 2) Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai kapasitas sesuai dengan bidang urusan yang diampu.
  - b. Kelemahan Organisasi
    - 1) Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas, mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi.
    - 2) Sebagian dari Sumber Daya Manusia, perlu ditingkatkan kualitas dan kinerjanya.
2. Lingkungan Eksternal
  - a. Peluang Organisasi
    - 1) Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan seluruh OPD dalam pelaksanaan tugas.
    - 2) Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
    - 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan.
    - 4) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

- 5) Adanya bantuan arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.
  - 6) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
  - 7) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
- b. Ancaman Organisasi
- 1) Kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah dan kurang sinkron satu sama lain, dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

## **B. Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi (OPD) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja;
2. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan APBD;
3. Belum optimalnya implementasi katalog versi 6;
4. Belum optimalnya penegasan batas daerah;
5. Belum optimalnya proses penyusunan produk hukum dan publikasi hukum;
6. Belum optimalnya pelayanan Kedinasan KDH / WKDH;
7. Sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah kurang memadai;
8. Belum Optimalnya Kinerja BUMD;
9. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan.

### C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Bab I           Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan.

Bab II           Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan perencanaan strategis, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III          Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diisajikan penjelasan metode pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi, analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran, serta akuntabilitas anggaran.

Bab IV          Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum capaian kinerja, progress penyelesaian isu strategis dan saran.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Rencana strategis juga akan memperjelas konsep organisasi dalam menentukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral dan komprehensif. Demikian halnya dengan organisasi Pemerintah Daerah, maka keberadaan rencana strategis mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, rencana strategis dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Rencana strategis dimaksud mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025 beserta program pendukungnya diuraikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

#### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 tergambar dalam matrik sebagai berikut:

**Tabel II.A.1**  
**Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 2. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan. 3. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum.
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP

## 2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut:

**Tabel II.A.2**  
**Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo**

Visi	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR</b>			
Misi 1	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi</b>			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>2. Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah</li> <li>3. Peningkatan koordinasi penegasan batas daerah</li> <li>4. Peningkatan penyelesaian permasalahan kewilayahan</li> </ol>	
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur produk hukum daerah			Peningkatan kapasitas SDM aparatur produk hukum daerah	
Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan			Pemberian layanan secara optimal kepada kemasyarakatan	
Meningkatkan kinerja BUMD			Peningkatan Kualitas Pembinaan kepada BUMD	
Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM pengadaan barang/jasa &amp; sarana prasarana pendukung</li> <li>2. Peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa</li> </ol>	
Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja			Komunikasi aktif dan intensif dengan perangkat daerah dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	
Menyempurnakan regulasi di bidang kelembagaan tata			Kajian dan dan evaluasi regulasi di	

<b>Visi</b>	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR</b>			
<b>Misi 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			laksana dan pengembangan kinerja	bidang kelembagaan, tatalaksana dan pengembangan kinerja
			Meningkatkan kapasitas SDM Bidang kelembagaan tatalaksanaan dan pengembangan kinerja	Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk aparatur perangkat daerah dalam bidang kelembagaan, tatalaksana dan pengembangan kinerja
			Meningkatkan kualitas layanan kedinasan KDH/WKDH	Peningkatan kualitas layanan kedinasan KDH/WKDH
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadahi	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
			Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur	Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
			Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan
- b) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur produk hukum daerah
- d) Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan
- e) Meningkatkan kinerja BUMD
- f) Memulihkan perekonomian daerah
- g) Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah

### 3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
  - 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
  - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;

- 3) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - 4) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
- b) Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
  - 2) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
  - 3) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; dan
  - 4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa.
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran terdiri dari
- 1) Kegiatan Penataan Organisasi;
  - 2) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Prokopim);
  - 4) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 6) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 8) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 10) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 11) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  - 12) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, adalah sebagaimana terlampir:

**Tabel II.B.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	100%
		2. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan.	100%
		3. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	79

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

### A. Metode Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut:

**Tabel III.A.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2021-2026, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu:

### 1. Tujuan Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pencapaian kinerja tujuan sebagai berikut:

**Tabel III.B.1**  
**Capaian Kinerja Tujuan**  
**Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		Tahun 2023		%Capaian thd. Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	86.37	102,82%	86.04	103.66%	85.35	104.08%	101,61%
2.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	87	n/a	n/a	99.36	116.89%	97.41	117,36%	n/a
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75	n/a	n/a	66.94	89.25%	65.04	100,06%	n/a
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>102,82%</b>					<b>101,61%</b>

Sumber: Bagian Organisasi Setda

Berdasarkan pengukuran kinerja tujuan, yaitu Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **102,82%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

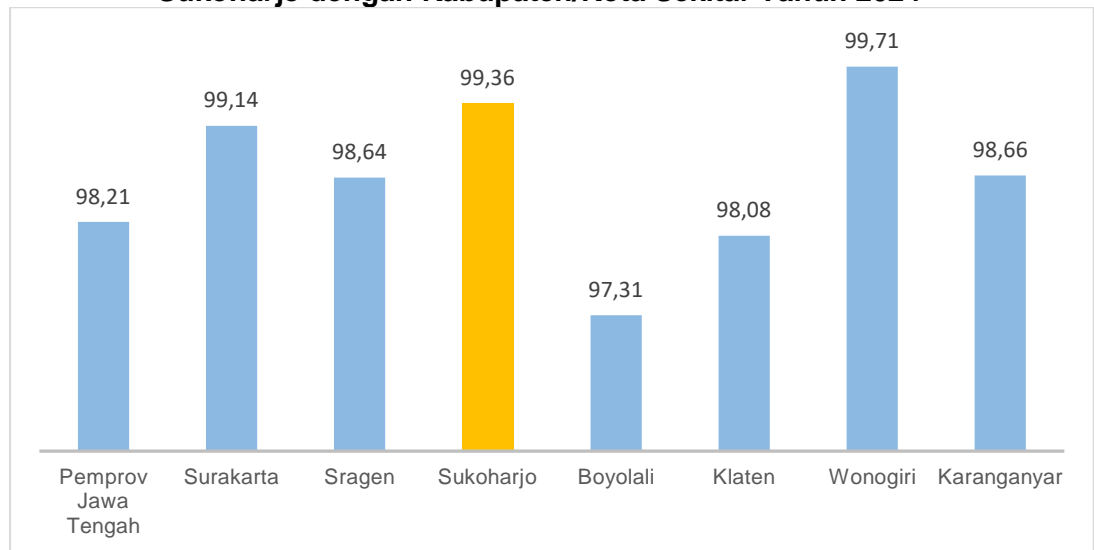
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata survey kepuasan masyarakat pada seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Mulai tahun 2023, survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dilakukan setiap semester, sehingga untuk IKM nilai tahunannya menggunakan rata-rata dari nilai semester I dan semester II. Adapun IKM Kabupaten Sukoharjo sebesar 86,37 merupakan rata-rata dari nilai semester I sebesar 86,28 dan nilai semester II sebesar 86,45. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 85 Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik telah menyampaikan laporan SKM dan Laporan Tindak Lanjut SKM periode sebelumnya. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan melalui Aplikasi SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) yang telah di implementasikan untuk mempermudah pelaksanaan SKM pada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam proses pengumpulan data responden dan pelaporan SKM secara otomatis.

b. Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan penilaian terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Saat laporan ini disusun, Ombudsman RI belum merilis Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2025. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 99,36 dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi). Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.1**  
**Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024**



*Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar 99,36 (Zona Hijau) Kualitas Tertinggi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil nilai 98,21. Pemerintah Kota Surakarta dengan nilai 99,14. Pemerintah Kabupaten Sragen dengan nilai 98,64, Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nilai 97,31, Pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai 98,09 dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai 98,66. Pencapaian hasil nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memperoleh hasil yang baik dan dan konsisten dikarenakan berhasil memperoleh peringkat 2 Nasional hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tingkat Kabupaten secara Nasional, dibawah Kabupaten Wonogiri yang berhasil memperoleh peringkat 1 Nasional dengan hasil nilai 99,71.

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

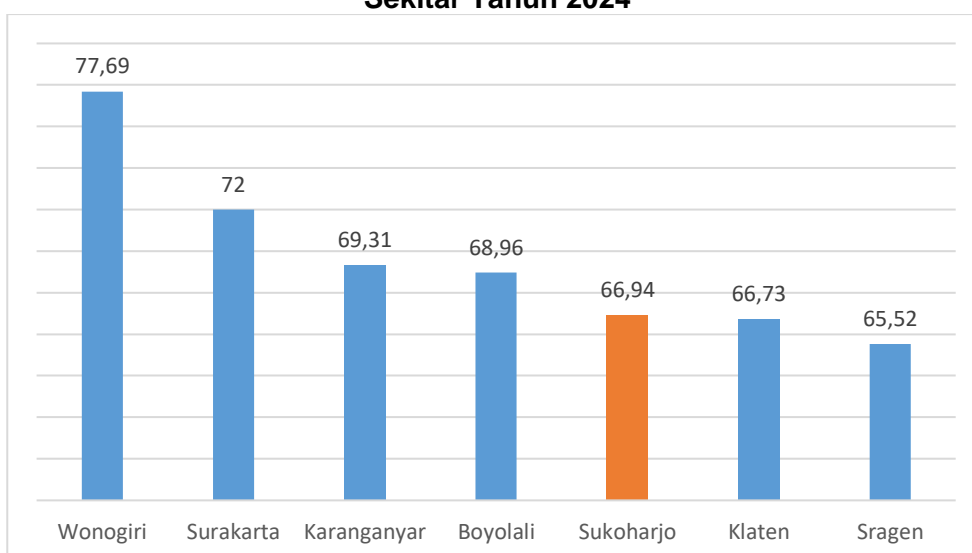
Nilai AKIP merupakan penilaian dari Kementerian PANRB terhadap Manajemen Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. Kementerian PANRB belum merilis nilai SAKIP tahun 2025 untuk semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sehingga indikator nilai AKIP tidak bisa dilakukan pengukuran kinerja.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam pencapaian indikator nilai AKIP antara lain:

- 1) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan evaluator Kementerian PANRB; Tim SAKIP Kabupaten yang meliputi Sekretariat Daerah, BAPPERIDA, BPKPAD, dan Inspektorat Daerah; dan Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Melengkapi IKU dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan.
- 3) Memasukkan kriteria penilaian kinerja perangkat daerah dalam pemberian TPP ASN pada tahun 2026.
- 4) Memastikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat kinerja yang progresif.
- 5) Memanfaatkan capaian kinerja untuk menentukan target pada perencanaan tahun mendatang.

Pada tahun 2024, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) memperoleh realisasi sebesar 66,94 dari target akhir RPJMD sebesar 80 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 83,68%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Nilai AKIP Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.2**  
**Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024**



Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo sebesar 66,94 dibawah Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan lebih tinggi dari Kabupaten

Klaten dan Kabupaten Sragen. Namun demikian, Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 berada di posisi 26 se Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan berada pada posisi 20 se Jawa Tengah.

## 2. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.B.1.1**  
**Capaian Kinerja pada Tahun 2025**  
**Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	121,21	121,21%
2.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	101,25	101,25%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>107,49%</b>

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, realisasi kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **107,49%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- a. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2025 terealisasi 100% dari target 121,21% sehingga capaiannya sebesar 121,21%.

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat merupakan indikator yang diperoleh dari total realisasi indikator pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dibagi total target indikator pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dikali 100 persen.

Adapun realisasi dan capaian indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat ditunjang

dari tiga indikator pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

**Tabel III.B.1.2**  
**Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	100%
2	Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	97	150	154,64%
3	Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100	100	100%

*Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk **Bagian Kesejahteraan Rakyat** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

b) Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial; dan
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 sudah terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan tahun 2024 yang juga mencapai 100%. Kedua capaian di tahun 2024 dan 2025 ini telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian di tahun 2023, yaitu sebesar 95%.

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat secara umum telah berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja dari capaian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Target Indikator yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian 12 Dokumen atau tercapai 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

- Terselenggaranya Kegiatan Pengajian Rutin Baitul Hikmah di Rumah Dinas Bupati Sukoharjo setiap bulan
  - Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan tingkat Kabupaten Sukoharjo
  - Terselenggaranya Kegiatan Amaliyah Ramadhan yang meliputi kegiatan Tarawih Keliling di 12 Kecamatan dan pembagian Paket Sembako kepada Masyarakat kurang mampu dan Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Kegiatan Halal Bihalal tingkat Kabupaten Sukoharjo
  - Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan bagi ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
  - Terfasilitasinya Jamaah Haji Kabupaten Sukoharjo
  - Terlaksananya pemberian hewan qurban bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Kabupaten Sukoharjo
  - Terlaksananya pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid
  - Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan keagamaan bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
  - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terkait Bidang Keagamaan
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Target Indikator yaitu 4 Dokumen dengan pencapaian 4 Dokumen atau tercapai 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

- Terfasilitasinya Pelaksanaan Pencairan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo

- Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan sosial bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
  - Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terkait Kesejahteraan Sosial
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Target Indikator yaitu 5 Dokumen dengan pencapaian 5 Dokumen atau tercapai 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

- Terselenggaranya Kegiatan Senam bersama ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya pemberian bantuan alat olahraga berupa bola dan net voli, bola dan jaring gawang bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan Kesenian bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan Olahraga bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terkait Kesejahteraan Masyarakat

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk **Bagian Hukum** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

b) Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Fasilitasi Bantuan Hukum;
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Adapun Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum terealisasi 150% dari target 97% dengan capaian 154,64%. Hal ini didukung oleh tercapainya target tiap-tiap sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.B.1.3**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Bagian Hukum Tahun 2025**

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Tersusun	Dokumen	3	3	100%	3	100%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	1	4	400%	8	400%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	Dokumen	2	2	100%	2	100%

Sumber: Bagian Hukum

Berdasarkan Matriks Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2025, pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum secara umum telah berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja pada masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah memiliki indikator kinerja berupa jumlah produk hukum yang tersusun dengan satuan dokumen. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 3 dokumen dan seluruh target tersebut dapat direalisasikan secara optimal dengan capaian 3 dokumen atau sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja yang sama dengan Tahun 2024, di mana realisasi dan persentase capaian juga mencapai 100%.
- b) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target Tahun 2025 sebanyak 1 kasus, realisasi yang dicapai sebanyak 4 kasus atau sebesar 400 persen. Persentase capaian tahun 2025 ini tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2024 karena pada tahun 2024 target kasus yang dicapai adalah 4 kasus dengan realisasi 8 kasus terselesaikan. Realisasi fasilitasi bantuan hukum tercapai 400% atau sebanyak 4 (empat) kasus dari target sebanyak 1 (satu) kasus didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- Target penyelesaian 1 kasus ditetapkan sebagai target minimal yang disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya serta potensi kompleksitas perkara. Dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi yang memungkinkan percepatan penyelesaian beberapa kasus secara bersamaan.
  - Terjalannya koordinasi yang efektif antara Bagian Hukum dengan perangkat daerah terkait serta pihak-pihak yang berperkara mendukung kelancaran proses penanganan kasus, sehingga beberapa kasus dapat diselesaikan dalam satu periode pelaporan.
  - Sebagian kasus yang ditangani memiliki karakteristik permasalahan yang relatif serupa, sehingga dapat diselesaikan secara paralel dengan pendekatan dan mekanisme yang sama, tanpa memerlukan tambahan waktu dan sumber daya yang signifikan.
  - Tim kerja yang kompeten dalam penanganan kasus hukum turut berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja, sehingga penyelesaian kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
  - Terdapat 1 kasus yang telah memasuki tahap akhir pada periode sebelumnya (2024) dan dapat dituntaskan pada periode pelaporan berjalan (2025), sehingga diakui sebagai realisasi kinerja tahun berjalan.
- c) Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum memiliki indikator kinerja berupa jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan dengan satuan dokumen. Target Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 2 dokumen dan seluruhnya dapat direalisasikan dengan capaian 100 persen. Capaian tersebut sejalan dengan kinerja Tahun 2024 yang juga mencapai 100 persen, menunjukkan keberlanjutan dan konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Hukum tahun 2025 antara lain:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berupa:

- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah sejumlah 7 Peraturan Daerah

- Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati sejumlah 67 Peraturan Bupati; dan
- Memfasilitasi Penyusunan Keputusan Bupati sejumlah 641 Keputusan
- Selain melakukan fasilitas penyusunan produk daerah juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.

b) Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Memfasilitasi Bantuan Hukum sebanyak 4 (empat) yaitu:

- Perkara Perdata Nomor: 809/Pdt.G/2024/PA.Skh antara Suginah (Penggugat) dan Camat Bendosari (Turut Tergugat II);
- Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2025/PN.Skh antara Maryono. SE Ex. Direktur Percaada (Penggugat) dan Inspektur Daerah (Tergugat);
- Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2025/PN.Skh antara Mulyani (Penggugat) dan Camat Sukoharjo (tergugat) ; dan
- Perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan Nomor 53/G/2025/PTUN.Smg antara PT Markis (Penggugat) dan Kepala DPKP (tergugat).

Selain memfasilitasi bantuan hukum juga melaksanakan kegiatan berupa:

- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Stakeholder Hak Asasi Manusia;
- Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru;
- Terlaksananya Fasilitas Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi manusia (P5 HAM) meliputi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin berupa kegiatan non litigasi.

c) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

- Melakukan pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan sebanyak: Peraturan Daerah 7 Dokumen; Peraturan Bupati 67 Dokumen; dan Keputusan Bupati 641 Dokumen.
- Melakukan Sosialisasi Hukum kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang meliputi: Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); dan Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi Perangkat Daerah.
- Melakukan pengelolaan terhadap perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- Melakukan Bimbingan Teknis bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa.
- Melakukan Publikasi Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati).

3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk **Bagian Pemerintahan** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Administrasi Tata Pemerintahan;
- Fasilitasi Kerjasama Daerah.

b) Sub Kegiatan:

- Penataan Administrasi Pemerintahan;
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
- Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri.

Adapun Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Adapun capaian kinerja tersebut diperoleh dari jumlah total realisasi indikator kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dibagi jumlah total target kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dikali 100 persen. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan terealisasi 5 kebijakan dari target 5 kebijakan. Keberhasilan pencapaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan didukung oleh:

- a) Adanya kerjasama yang baik dengan Kabupaten sekitar dan para pihak pemangku kepentingan
- b) Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan penyusunan data-data LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM yang waktunya sudah dimulai sejak akhir tahun berjalan khususnya dengan memberikan bimbingan teknis penyusunan, rapat koordinasi dan pengumpulan matrik data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah terealisasi 12 dokumen dari target 10 dokumen. Keberhasilan pencapaian kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah didukung oleh meningkatnya kesadaran para pihak untuk melakukan kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

- b. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan pada tahun 2025 terealisasi 99,82% dari target 100% sehingga capaiannya mencapai 99,82%.

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan merupakan indikator yang diperoleh dari total realisasi indikator pada program Perekonomian dan pembangunan dibagi total target indikator pada program perekonomian dan pembangunan dikali 100 persen.

Adapun realisasi dan capaian indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang melampaui target ditunjang dari tiga indikator pada program Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut:

**Tabel III.B.1.4**  
**Capaian Program Perekonomian Dan Pembangunan Tahun 2025**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	100	100	100%
2	Cakupan pengadaan barang dan jasa	78	81,47	104,45%
3	Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	100	100	100%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian PBJ; dan Bagian Perekonomian & SDA

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Perekonomian dan Pembangunan, untuk **Bagian Administrasi Pembangunan** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

b) Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Adapun Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 indikator kinerja pada masing-masing 3 sub kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan tercapai sesuai target yang ditetapkan dan capaian rata-rata 100%.

Aktivitas yang dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan antara lain antara lain:

- a) Pelaksanaan forum OPD yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025;
- b) Penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2026;
- c) Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan yang dilaksanakan setiap triwulannya;
- d) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis TA 2025 10 (sepuluh) proyek strategis tahun 2025 dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Fisik kepada OPD penerima DAK Fisik TA 2025 yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispusip, RSUD, dan DPPKBP3A.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada OPD penerima yaitu: DPMD, BAPPERIDA, dan Kecamatan Sukoharjo..
- g) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan fisik. Pada Tahun 2025

ada 94 (Sembilan puluh empat) desa dengan 246 (dua ratus empat puluh enam) titik penerima bantuan keuangan untuk fisik/konstruksi APBD Penetapan TA 2025. Desa-desa tersebut sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025.

2) Program Perekonomian Dan Pembangunan, untuk **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** terdiri dari

a) Kegiatan:

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

b) sub Kegiatan:

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Capaian Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan) target nilai 78 dengan realisasi nilai 81,47 atau capaian kinerja 104,45% dengan kategori Sangat Baik. Nilai tersebut merupakan Nilai ITKP Tahun 2025 sesuai dengan Surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP RI Nomor: 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 perihal Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Adapun Nilai ITKP Tahun 2025 81,47 dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan skor 25,31 dari skor maksimal 30. Skor tersebut terdiri dari: SiRUP mendapat skor 10,00; E-Tendering 5,00; E-Katalog 3,29; Toko Daring 0,00; Non e-Tendering /Non e-Purchasing 2,55; dan e-Kontrak 4,47.
- Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan skor 16,16 dari skor maksimal 30.
- Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan skor 40.00 dari skor maksimal 40.

Berdasarkan hasil Nilai ITKP Tahun 2025 masih terdapat indikator yang belum maksimal yaitu Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, hal ini dikarenakan indikator tersebut berdasarkan terpenuhinya JF PPBJ

sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh LKPP sebanyak 26 orang saat ini baru terpenuhi 14 orang (53,85%). Sedangkan untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang belum maksimal antara lain: e-katalog, toko daring, non e-tendering/non e-purchasing dan e-kontrak, hal dikarenakan masih kurangnya komitmen Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyelesaikan paket tender/seleksi (e-kontrak dan penilaian kinerja penyedia), paket non tender/seleksi (pencatatan pembelian langsung, e-kontrak, penilaian kinerja) dan paket e-purchasing sampai dengan paket selesai. Adapun Indikator yang mendukung pencapaian Nilai ITKP dari Kematangan UKPBJ Kabupaten Sukoharjo telah mencapai level Proaktif 9/9 sehingga dapat mencapai skor maksimal 40.

Pada Tahun 2025 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dari target 100% tercapai 109,70% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini didukung oleh tercapainya target tiap-tiap Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.B.1.5  
Capaian Kinerja Kegiatan Bagian PBJ Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Realisasi 2023	% Capaian 2023
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	prosentase	100	109,70	109,70 %	108,26	108,26 %	120,16	120,16 %
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	1000	870	87,00%	837	83,70%	988	98,80%
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	12	12	100,00 %	12	100,00 %	12	100,00 %
4	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	orang	380	540	142,11 %	522	141,08 %	582	161,67 %

Sumber: Bagian PBJ

Berdasarkan Matriks Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025, pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara

umum telah berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja pada masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dari 1 (satu) indikatornya yaitu jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa ditargetkan 1000 dokumen dapat direalisasikan 870 dokumen atau 87% dengan rincian 60 dokumen tender/seleksi dan 810 dokumen non tender/seleksi (pengadaan langsung) dengan kategori “Baik”. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan kewajiban penggunaan metode e-purchasing untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik, sehingga untuk pengadaan barang/jasa yang rencananya akan dilaksanakan melalui tender atau pengadaan langsung apabila barang/jasa yang dibutuhkan sudah tersedia pada katalog elektronik maka dilakukan melalui metode *e-purchasing*. Adapun Jumlah paket *e-purchasing* Tahun 2025 sebanyak 2361 paket. Pada sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan juga didukung juga melaksanakan kegiatan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan setiap Triwulan.
- Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait dengan Perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah kepada ASN dilingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Melaksanakan pendampingan pengadaan barang/jasa kepada pemerintah desa terkait dengan pengadaan barang/jasa desa berdasarkan permohonan yang disampaikan, yaitu antara lain kepada Desa Bulu Kecamatan Bulu, Desa Pandeyan Kecamatan Grogol dan Desa Karangwuni Kecamatan Weru.

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dari 1 (satu) indikatornya yaitu Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan

target 12 dokumen dapat direalisasikan 12 dokumen memenuhi target yang ditetapkan atau 100%, dengan kategori Baik. Adapun data terkait dengan jumlah pengguna layanan pengadaan secara elektronik diambil dari jumlah kunjungan layanan pengadaan secara elektronik yang tercatat secara digital dalam bentuk dokumen laporan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan jumlah pengguna layanan sebanyak 141 orang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 8 orang dan penyedia sebanyak 133 orang. Adapun layanan yang diberikan kepada pengguna layanan pengadaan secara elektronik antara lain : pendaftaran penyedia, verifikasi akun penyedia, pendaftaran penyedia katalog, penayangan produk katalog dan konsultasi bagi penyedia dan perangkat daerah yang memerlukan informasi atau menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, dari 1 (satu) indikator Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa ditargetkan 380 orang dapat direalisasikan 540 orang atau 142,11% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini karena banyak peraturan perundang-undangan dan kebijakan- kebijakan baru yang perlu untuk disampaikan dan dipahami oleh para pelaku pengadaan barang/jasa dan terdapat pegeseran anggaran. Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan kegiatan antara lain:

- Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Rapat Koordinasi terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakan sebanyak 4 (enam) kali kegiatan, yaitu: bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang/jasa dengan peserta admin SiRUP, sosialisasi Katalog Versi 6.0. bagi Penyedia, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Rapat Koordinasi Persiapan Penginputan SiRUP Tahun Anggaran 2026 dengan peserta Admin SiRUP.

- Tim Koordinasi Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 melalui rapat koordinasi setiap bulan yang dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari s/d Desember 2025 dengan membahas perkembangan 10 (sepuluh) proyek strategis. Tim terdiri dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo.
  - Pendampingan dan/atau konsultasi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 3) Program Perekonomian Dan Pembangunan, untuk **Bagian Perekonomian dan SDA** terdiri dari:
- a) Kegiatan:
- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
  - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.
- b) Sub Kegiatan:
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
  - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
  - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
- Adapun Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena tahun 2025 indikator kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan SDA tercapai sesuai target yang ditetapkan dan capaian 100%. Hal ini

disebabkan karena Fungsi Bagian Perekonomian dan SDA sebagai Koordinasi didukung oleh Perangkat Daerah dan Stake holder terkait.

- c. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum pada tahun 2025 terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum merupakan indikator yang diperoleh dari total realisasi indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi total target indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100 persen.

Adapun realisasi dan capaian indikator perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum ditunjang dari tiga indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**Tabel III.B.1.6**  
**Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	100	100	100%
2	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	100	100	100%
3	Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	100	100	100%

*Sumber: Bagian Organisasi; Bagian Prokompim; dan Bagian Umum*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk

**Bagian Organisasi** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Penataan Organisasi.

b) sub Kegiatan:

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi dari tersusun dan terselesaikannya dokumen yang mencakup:

- a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Terselesaikannya dokumen dimaksud tidak lepas dari koordinasi dan dukungan dari jajaran perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo; tersedianya peraturan perundangan dan petunjuk teknis dari instansi pemerintah Pembina; dukungan dan komitmen pimpinan dalam bentuk kebijakan dan penyelesaian hambatan birokrasi; dan kemampuan tim untuk beradaptasi terhadap perubahan regulasi atau kondisi lapangan yang tidak terduga memastikan kegiatan tetap relevan dan target tetap tercapai meski terjadi pergeseran situasi.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk **Bagian Umum** terdiri dari 9 Kegiatan dan 38 sub Kegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan:
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

b) Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Umum telah dilaksanakan dengan baik dan terarah. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator Persentase Pencapaian Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah yang terealisasi 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerja juga mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari komitmen dan sinergi seluruh unsur pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh tersusun dan terselesaikannya berbagai aktivitas di antaranya:

- a) Terlaksananya Forum OPD yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2025
- b) Tersusunnya Dokumen Renstra Setda 2025-2029
- c) Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Daerah Tahun 2025
- d) Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025
- e) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

- f) Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah
- g) Terlaksananya Pengembangan kapasitas ASN SETDA yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2025
- h) Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas
  - Mobil Dinas Wakil Bupati 1 Unit
  - Mobil Dinas Sekda 1 Unit
  - Mobil Dinas Muspida 4 Unit
  - Mobil Dinas Kepala Bagian 9 Unit
- i) Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Laptop di Bagian- bagian
- j) Terlaksananya Pengadaan Videotron di Pendopo GSP
- k) Terlaksananya Pengadaan TV Smart di Ruang Rapat Asisten dan Ruang Kabag PBJ dan Kesra
- l) Terlaksananya Pemeliharaan dan Renovasi Bangunan di sekitar Lingkungan Setda diantaranya:
  - Pembuatan Taman Depan Pagar Kantor Sekretariat Daerah
  - Renovasi Genteng Pendopo GSP
  - Renovasi Atap Plaza Parkir Sepeda Motor
  - Pengecoran Lahan Parkir Lantai 2 sebelah Utara
  - Renovasi Atap Rumah Dinas Sekda
  - Pembuatan Pagar Belakang Halaman Setda
  - Pemeliharaan Pengecatan Pagar Lingkungan Setda
  - Pemeliharaan Pembersihan Kaca Gedung Menara Wijaya

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah Tahun 2025 mencapai 87,09. Tingginya nilai IKM ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan, responsivitas aparatur, serta penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat. Hasil survei ini sekaligus menjadi indikator bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan berjalan efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ke depan, Sekretariat Daerah akan terus melakukan evaluasi dan inovasi

pelayanan guna mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Adapun capaian indikator Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

b) sub Kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Keprotokolan;
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

Fasilitasi Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan target pada tahun 2025 adalah 100% dan dapat dicapai dengan realisasi 100%.

Hal ini dikarenakan setiap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah terfasilitasi dengan maksimal, yang mana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan merupakan Bagian yang sudah melekat dengan agenda rutin pimpinan.

Selain Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga mengampu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan dan telah terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Adapun bentuk Sosialisasi dalam rangka Gempur Rokok ilegal dengan Sosialisasi Media Tatap Muka dan Media Elektronik. Sosialisasi tatap muka melalui yang dilaksanakan di ditempat strategis, Talk Show melalui Pod Cast dan Siaran Radio Interaktif, Advetorial dan Special Event. Adapun untuk media luar ruang meliputi Baliho Gempur Rokok Ilegal, Penyampaian Informasi Gempur rokok illegal melalui Running Text dan Videotron, Spanduk, sticker dan X-Banner.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel III.B.1.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023**  
**Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	121,21	121,21%	100	100%	99,66	99,66%
2.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	101,25	101,25%	113,26	113,26%	113,27	113,27%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100%	100	100%	100	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- a. Realisasi indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2023 sebesar 99,66 dengan capaian 99,66%. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan realisasi menjadi 100 dengan capaian 100%. Kemudian pada tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi menjadi 121,21 dengan capaian 121,21%. Terdapat kenaikan realisasi dan capaian sebesar 21,21%.
- b. Realisasi indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan realisasi, yaitu sebesar 113,27 dengan capaian 113,27% pada tahun 2023 turun menjadi 113,26 dengan capaian 113,26% pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025 terealisasi menjadi 101,25 dengan capaian 101,25%.
- c. Realisasi indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum pada tahun 2023 hingga tahun 2025 terealisasi sebesar 100 dengan capaian 100%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2025 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.B.1.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**  
**Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	121,21	100	121,21%
2.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	99,82	100	99,82%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>107,01%</b>

Realisasi kinerja tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka rata-rata capaian sasaran 1 adalah **107,01 %**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- a. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat memperoleh realisasi sebesar 121,21 dari target akhir Renstra sebesar 100 sehingga capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 121,21 %.
- b. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan memperoleh realisasi sebesar 99,82 dari target akhir Renstra sebesar 100 sehingga capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 99,82%.
- c. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi umum memperoleh realisasi sebesar 100 dari target akhir Renstra sebesar 100 sehingga capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 100%.

**Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran 1 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian level nasional, provinsi, kabupaten maupun Perangkat Daerah lain karena perbedaan indikator.**

### **3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

Pencapaian kinerja pada sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.B.2.1**  
**Capaian Kinerja pada Tahun 2025**  
**Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			% Capaian thd. Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai SAKIP	Angka	79	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP, pada tahun 2025 indikator tersebut belum bisa diukur terhadap target tahun 2025 karena evaluasi implementasi SAKIP belum dilaksanakan atau belum dievaluasi oleh Inspektorat Daerah.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel III.B.2.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023**  
**Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai SAKIP	Angka	79	n/a	n/a	78,78	102,31%	85,29	113,72%

Kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dilakukan evaluasi untuk dokumen tahun 2025. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP pada tahun 2023 terealisasi sebesar 85,29 dengan capaian 113,72%. Pada tahun 2024 turun menjadi 78,78 dengan capaian 102,31%. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan yang ditemukan dalam hasil evaluasi Inspektorat, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, antara lain:

- a. Perencanaan kinerja belum optimal, dimana dokumen rencana aksi belum memuat rincian kegiatan yang konkret dan masih bersifat umum. Beberapa rencana aksi masih berupa pernyataan sasaran, bukan langkah operasional yang jelas.

- b. Publikasi dokumen perencanaan belum tepat waktu, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SAKIP.
- c. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai secara terukur, khususnya dalam aspek kualitas layanan.
- d. Target kinerja belum dilakukan benchmarking, sehingga belum dapat dibandingkan dengan perangkat daerah sejenis di daerah lain sebagai tolok ukur praktik terbaik.
- e. Bukti dukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum memadai, termasuk dokumentasi hasil monev dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang belum terdokumentasi secara lengkap.
- f. Pada aspek pengukuran kinerja, pedoman teknis dan SOP belum dilegalisasi secara formal, serta belum dilengkapi mekanisme validasi dan koreksi data untuk menjamin keandalan data kinerja.
- g. Dokumen sumber data pengukuran kinerja belum lengkap, karena belum disertai kertas kerja dari masing-masing bagian sebagai pendukung capaian kinerja.
- h. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran.
- i. Pada aspek pelaporan kinerja, dokumen LKjIP belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Dengan adanya berbagai kelemahan tersebut, berdampak pada penurunan nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, diperlukan penguatan komitmen dalam penyusunan perencanaan yang lebih terukur, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk melihat perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lain, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

**Tabel III.B.2.3**  
**Perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lain**

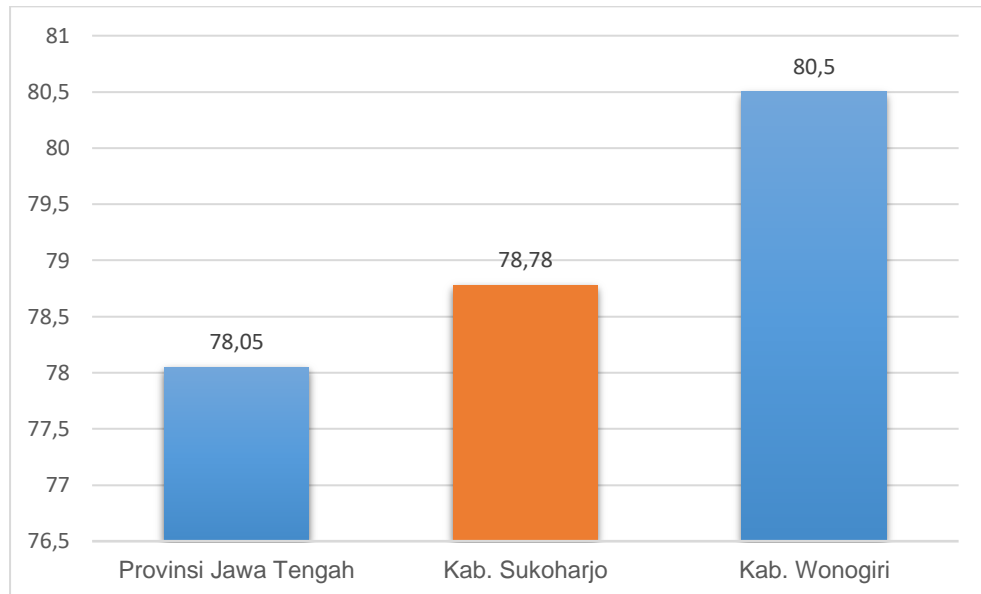
No	Nama SKPD	Nilai SAKIP	Predikat	Progress
1	Dinas Kesehatan	97,5	AA	1,32
2	Kecamatan Mojolaban	88,49	A	0,13
3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	85,52	A	0,32
4	Inspektorat Daerah	83,75	A	5,01
5	Dinas Sosial	83,22	A	10,3
6	Dinas Pangan	82,43	A	14,81
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,3	A	1,83
8	Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,66	A	3,67
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,57	A	2,05
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81,03	A	2,03
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	80,64	A	5,51
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,62	A	6,1
13	Dinas Perhubungan	80,56	A	4,7
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,23	A	7,55
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	80,05	A	5,49
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	79,78	BB	2,54
17	Dinas Lingkungan Hidup	79,53	BB	3,02
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79,14	BB	2,7
19	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>78,78</b>	<b>BB</b>	<b>-6,51</b>
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78,52	BB	0,24
21	Kecamatan Grogol	78,38	BB	4,42
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,83	BB	5,11
23	Kecamatan Sukoharjo	77,16	BB	7,36
24	Satuan Polisi Pamong Praja	77,1	BB	2,28
25	Kecamatan Weru	76,99	BB	8,47
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	76,96	BB	0,93
27	Kecamatan Baki	76,46	BB	1,93
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76,28	BB	3,06
29	Kecamatan Nguter	75,87	BB	9,26
30	Kecamatan Polokarto	75,66	BB	6,84
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,15	BB	0,44
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74,88	BB	0,37
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74,64	BB	0,08
34	Kecamatan Kartasura	74,17	BB	4,86
35	Kecamatan Bulu	74,15	BB	1,51
36	Kecamatan Bendosari	71,46	BB	0,52
37	Kecamatan Tawang Sari	70,96	BB	-1,67
38	Kecamatan Gatak	70,24	BB	8,41
39	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	65,79	B	3,76
	<b>RATA-RATA NILAI SAKIP OPD</b>	<b>78,60</b>	<b>BB</b>	

Sumber: Inspektorat Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Sekretariat Daerah sebesar 78,78 (BB) berada pada peringkat 19 dari total 39 Perangkat Daerah. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP OPD sebesar 78,60, maka nilai SAKIP Sekretariat Daerah masih lebih tinggi.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada diagram berikut:

**Gambar III.B.3**  
**Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan**  
**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten**  
**Wonogiri Tahun 2024**



*Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo*

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 78,78. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 78,05 dan lebih rendah dibandingkan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiridengan nilai sebesar 80,50.

### C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

Rekapitulasi capaian IKU, anggaran dan realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.C.1  
 Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi	%
1.1	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	121,21%	22.363.420.000	21.264.375.681	95,09%
1.2	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	99,82%	2.232.758.200	2.144.581.309	96,05%
1.3	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	100%	56.875.344.700	52.990.755.085	93,17%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	105.350.000	101.767.600	96,60%

## D. Analisis Efisiensi Sumber Daya Non Keuangan

### 1. Sumber Daya Manusia

Adapun data peta jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.D.1  
Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No	NAMA BAGIAN	BEZZETING	KEBUTUHAN	SELISIH
1	Umum	48	70	-22
2	Perekonomian dan SDA	12	20	-8
3	Administrasi Pembangunan	10	22	-12
4	Prokopim	18	36	-18
5	Kesejahteraan Rakyat	13	21	-8
6	Hukum	13	45	-32
7	Pemerintahan	9	18	-9
8	PBJ	19	37	-18
9	Organisasi	14	21	-7
Jumlah		156	290	-134

Sumber: Bagian Umum dan Bagian Organisasi, diolah.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebanyak 156 orang. Jika dibandingkan dengan kebutuhan sebanyak 290 orang, terdapat selisih sebanyak 134 orang. Meskipun terdapat selisih sumber daya manusia yang banyak, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo mampu memperoleh rata-rata capaian kinerja Baik.

### 2. Upaya Efisiensi melalui Teknologi

#### a. e-koreksi

Aplikasi E-Koreksi merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait pengajuan koreksi Produk Hukum Daerah secara digital dan *paperless*. Aplikasi layanan *online* ini dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Bagian Hukum serta mempercepat dan mempermudah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam penyusunan Produk Hukum Daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, Instruksi Bupati, maupun Perjanjian Kerja Sama dan Kesepakatan Bersama. Dalam Aplikasi E-Koreksi terdapat menu pengajuan draft/rancangan Produk Hukum Daerah yang akan dikoreksi dengan menyertakan Surat Pengantar

yang seluruhnya di upload secara *online* sehingga tidak lagi memerlukan berkas fisik yang harus dikirim ke Bagian Hukum. Selain itu, di dalam Aplikasi E-Koreksi terdapat *timeline*/Riwayat Pengajuan berupa kolom status dan waktu yang dapat digunakan untuk mengontrol sejauh mana produk hukum yang dikirim oleh Perangkat Daerah telah diproses. Aplikasi E-Koreksi diharapkan mampu menjawab tuntutan efektivitas dalam melaksanakan koreksi Produk Hukum Daerah dan juga mampu memberikan kontribusi positif dalam keberlanjutan roda pemerintahan di era digitalisasi terhadap sistem pelayanan. Melalui Aplikasi E-Koreksi ini, pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap koreksi Produk Hukum Daerah semakin cepat, mudah, akuntabilitas, transparan, dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun perbandingan sebelum dan sesudah penerapan e-Koreksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.D.2  
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Koreksi

Aspek yang Dinilai	Sebelum Penerapan e-Koreksi	Sesudah Penerapan e-Koreksi
<b>Proses koreksi produk hukum</b>	Dilakukan secara manual dan terpisah, melalui pertukaran dokumen fisik atau komunikasi tidak terintegrasi	Dilakukan secara elektronik dan terstruktur dalam satu sistem terintegrasi
<b>Waktu penyelesaian</b>	Relatif lebih lama karena ketergantungan pada pertemuan tatap muka dan distribusi berkas manual	Lebih cepat karena koreksi dapat dilakukan secara daring dan simultan
<b>Keterlacakan proses</b>	Riwayat koreksi sulit ditelusuri dan tidak terdokumentasi secara sistematis	Setiap tahapan koreksi terdokumentasi dan mudah ditelusuri
<b>Kualitas dan konsistensi koreksi</b>	Berpotensi terjadi pengulangan koreksi dan inkonsistensi redaksional	Konsistensi substansi dan redaksi lebih terjaga melalui catatan koreksi terpusat
<b>Efisiensi penggunaan sumber daya</b>	Membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar untuk koordinasi dan administrasi	Lebih efisien karena mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi proses
<b>Ketersediaan data dukung kinerja</b>	Data proses dan output tersebar dan memerlukan pengumpulan ulang untuk pelaporan	Data tersimpan secara elektronik dan siap digunakan sebagai data dukung LKJIP

Sumber: Bagian Hukum

#### b. SIMPOK

Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK) adalah sebuah aplikasi yang di-inisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagai alat bantu didalam pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo sehingga mempermudah dalam monitoring dan evaluasi terhadap proses penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SIMPOK hadir sebagai solusi digital untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam pelaporan realisasi anggaran. Sebagai instrumen kendali, aplikasi ini memastikan setiap rupiah dalam APBD secara *real-time*.

### Fungsi Utama SIMPOK

- Pusat Data Pelaporan (Centralized Reporting): Menjadi wadah tunggal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menginput data capaian kegiatan.
- Instrumen Monitoring Real-Time: Memungkinkan pimpinan (Bupati/Sekda) untuk memantau grafik penyerapan anggaran kapan saja tanpa menunggu laporan fisik di akhir bulan.
- Early Warning System: Berfungsi sebagai sistem peringatan dini jika terdapat kegiatan yang progresnya melambat atau tidak sesuai target (deviasi negatif).
- Alat Evaluasi Kinerja: Menyediakan basis data yang akurat untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kerja masing-masing unit.

### Manfaat Penggunaan Aplikasi

Penggunaan SIMPOK memberikan dampak positif yang sistemik bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo:

- Akurasi Data: Meminimalisir kesalahan input manual (human error) yang sering terjadi pada pelaporan berbasis kertas atau *spreadsheet* konvensional.
- Transparansi Internal: Menciptakan akuntabilitas di tingkat OPD karena setiap tahapan kegiatan terekam secara digital.
- Efisiensi Waktu dan Sumber Daya: Memangkas rantai birokrasi dalam pengumpulan laporan. Staf tidak perlu lagi bolak-balik mengirimkan dokumen fisik ke Bagian Administrasi Pembangunan.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data-Driven Decision Making): Pimpinan dapat langsung mengambil kebijakan strategis (seperti percepatan lelang atau pergeseran anggaran) berdasarkan data aktual di SIMPOK.

### Analisis Transformasi: Before vs After

Transformasi yang dibawa SIMPOK menciptakan perubahan budaya kerja yang signifikan. Berikut adalah perbandingannya:

Tabel III.D.3  
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMPOK

Aspek	Sebelum (Manual/Tradisional)	Sesudah (Menggunakan SIMPOK)
Kecepatan Laporan	Laporan sering terlambat karena proses kompilasi manual dari banyak OPD.	Laporan tersedia seketika setelah OPD melakukan pemutakhiran data ( <i>Instant update</i> ).
Aksesibilitas Data	Data tersimpan di arsip fisik atau laptop staf tertentu; sulit diakses secara cepat.	Data berbasis cloud; dapat diakses melalui dasbor aplikasi oleh pihak berwenang.
Akurasi & Validitas	Rentan terjadi duplikasi data atau ketidaksinkronan angka antar dokumen.	Validasi sistem memastikan data konsisten dan sinkron antara anggaran vs realisasi.
Pengambilan Keputusan	Pengambilan Keputusan sering kali terlambat karena laporan yang terlambat.	Pengambilan Keputusan dapat dilakukan secara cepat dan akurat berbasis data.

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

### c. SI EMON BANGUN

SI EMON BANGUN merupakan Sistem Informasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan dalam Rangka Pengendalian dan Transparansi Pembangunan Infrastruktur, yaitu sebuah sistem yang diharapkan akan menjadi alat yang efektif dalam memantau, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo yang tidak lepas dari transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memfasilitasi kolaborasi antara Perangkat Daerah, Pelaksana Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan mendorong terciptanya mekanisme pembangunan infrastruktur yang berkualitas, disiplin, tertib administrasi, efektif serta efisien.

#### Fungsi Utama SI EMON BANGUN

- Dashboard Monitoring Kolaboratif: Menjadi ruang kerja digital yang memfasilitasi interaksi antara Perangkat Daerah, Pelaksana (Kontraktor), dan Konsultan Pengawas secara *real-time*.
- Verifikasi Administrasi Digital: Mengotomatisasi proses administrasi pembangunan sehingga setiap tahapan proyek memiliki rekam jejak digital yang valid.
- Media Pengawasan Publik: Berfungsi sebagai jendela informasi bagi masyarakat Sukoharjo untuk melihat progres fisik, nilai kontrak, hingga lokasi pembangunan melalui portal publik.

- Alat Kendali Mutu dan Waktu: Memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan jadwal (kurva-S) dan spesifikasi yang telah disepakati melalui pengawasan berlapis.

Implementasi SI EMON BANGUN memberikan nilai tambah yang signifikan bagi berbagai pihak:

- Bagi Pemerintah Daerah: Terciptanya tertib administrasi dan disiplin anggaran. Pimpinan dapat melakukan intervensi cepat jika ditemukan proyek yang mengalami deviasi atau keterlambatan.
- Bagi Pelaksana & Konsultan: Mempermudah koordinasi pelaporan tanpa harus selalu bertatap muka, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.
- Bagi Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan (*public trust*) kepada pemerintah karena masyarakat diberikan akses untuk mengawasi langsung uang pajak yang digunakan untuk pembangunan di lingkungan mereka.
- Kualitas Infrastruktur: Dengan pengawasan yang ketat dan transparan, potensi kecurangan atau penurunan kualitas material dapat diminimalisir

Analisis Transformasi: Before vs After

Perubahan pola kerja dari metode konvensional menuju digitalisasi melalui SI EMON BANGUN menciptakan dampak sebagai berikut:

Tabel III.D.4  
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan SI EMON BANGUN

Aspek Perubahan	Sebelum (Metode Konvensional)	Sesudah (Menggunakan SI EMON BANGUN)
Akses Informasi Publik	Masyarakat sulit mendapatkan detail proyek; informasi hanya terbatas pada papan proyek di lokasi.	Informasi terbuka luas melalui portal resmi; dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
Sinergi Antar Pihak	Koordinasi antara OPD, Kontraktor, dan Pengawas sering terhambat jarak dan birokrasi fisik.	Kolaborasi terjadi dalam satu sistem terintegrasi; komunikasi dan laporan menjadi lebih cepat.
Kecepatan Monitoring	Evaluasi biasanya dilakukan secara periodik (bulanan), sehingga penanganan masalah sering terlambat.	Monitoring dilakukan setiap hari secara digital; deteksi dini terhadap kendala proyek lebih akurat.
Transparansi Data	Data pembangunan cenderung tertutup dan hanya dikonsumsi internal pemerintah.	Transparansi penuh sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pemenuhan hak informasi warga.
Arsip Administrasi	Dokumen pembangunan berserakan di berbagai kantor dan berisiko hilang atau rusak.	Seluruh dokumen administrasi tersimpan secara digital dalam basis data yang aman dan terorganisir.

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

d. SPSE

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat diakses melalui aplikasi <https://spse.inaproc.id/sukoharjokab>. SPSE merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (tender/seleksi/tender cepat, non tender (penunjukan langsung dan pengadaan langsung), pencatatan non tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat, *e-audit*, dan manajemen kontrak). Selain itu SPSE juga memfasilitasi pendaftaran Pelaku Usaha baru. Dalam penyusunan rencana umum pengadaan menggunakan aplikasi <https://sirup.lkpp.go.id>, sedangkan untuk proses pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik menggunakan aplikasi <https://katalog.inaproc.id>. Dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik data-data dapat tersimpan dalam sistem dan dapat diunduh apabila dibutuhkan.

e. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

LPPD merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah input data LPPD dari perangkat daerah agar segera dapat disusun menjadi LPPD, aplikasi ini mempersingkat waktu dalam penyusunan LPPD yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Bagian Pemerintahan juga berperan sebagai admin dari Aplikasi e-LPPD dan e-SPM yang dimiliki oleh Kemendagri yang menjadi sarana pelaporan pemerintah daerah secara berkala untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerjanya. Kedua aplikasi ini menjadi sarana pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi kepada pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan dilampiri bukti dukung yang sesuai.

f. SIPATAS (Sistem Informasi Pilar Batas)

Sipatas dikembangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan masuk dalam layer Pusat Informasi Spasial Daerah (Pisda), sipatas memberikan informasi Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan letak pilar batas yang menjadi penanda batas daerah dengan kabupaten/kota sekitar. Informasi ini memberikan gambaran wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan menampilkan batas-batas yang jelas sehingga dapat menentukan rencana pemabangunan dengan lebih tepat.

d. SINERGI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi bahwa semua gedung pemerintah harus menerapkan Manajemen Energi. Salah satu upaya penerapan manajemen energi adalah melaksanakan pelaporan penghematan energi setiap bulan. Sebagai upaya untuk memudahkan pelaporan penghematan energi dan air maka Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA membuat aplikasi dengan nama SINERGI. Aplikasi tersebut memfasilitasi pelaporan penghematan energi dan air untuk semua perangkat daerah yang memiliki gedung. Aplikasi SINERGI menyampaikan pelaporan konsumsi Listrik dan air setiap bulan sehingga setiap tahunnya dapat diketahui Konsumsi Energi, Intensitas Kinerja Energi (IKE) dan upaya penghematan. Alamat Website: <https://sinergi.sukoharjokab.go.id>.

## E. Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan

### 1. Tingkat Efisiensi

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 mencapai Rp. 76.399.712.075,- atau 93,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 81.473.522.900,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.073.810.825,- atau 6,23%. Perhitungan tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Capaian kinerja} \times \text{pagu anggaran}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun tingkat efisiensi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.D.5  
Tingkat Efisiensi**

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	100.0%	Rp20,550,952,500.00	Rp19,529,517,048.00	95.03%	5.23%	Efisien
	Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	97	150	154.64%	Rp854,938,000.00	Rp836,127,331.00	97.80%	58.12%	Efisien
	Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100	100	100.0%	Rp957,529,500.00	Rp898,731,302.00	93.86%	6.54%	Efisien
<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Kajian/ Kebijakan yang disusun/ dievaluasi</b>	5	5	100.0%	Rp861,699,500.00	Rp805,869,572.00	93.52%	6.93%	Efisien
Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	3	100.0%	Rp207,800,000.00	Rp191,879,082.00	92.34%	8.30%	Efisien
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	3	100.0%	Rp214,750,000.00	Rp201,278,500.00	93.73%	6.69%	Impas
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	4	4	100.0%	Rp439,149,500.00	Rp412,711,990.00	93.98%	6.41%	Efisien
<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Kerja Sama yang di Tanda Tangani</b>	10	12	120.0%	Rp95,830,000.00	Rp92,861,730.00	96.90%	23.84%	Efisien
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	12	120.0%	Rp95,830,000.00	Rp92,861,730.00	96.90%	23.84%	Efisien
<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</b>	100	100	100.0%	Rp20,550,952,500.00	Rp19,529,517,048.00	95.03%	5.23%	Efisien
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	12	100.0%	Rp5,572,362,500.00	Rp4,893,392,708.00	87.82%	13.88%	Efisien
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	4	100.0%	Rp13,491,440,000.00	Rp13,251,789,340.00	98.22%	1.81%	Efisien
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5	5	100.0%	Rp1,487,150,000.00	Rp1,384,335,000.00	93.09%	7.43%	Efisien
<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	97	150	154.6%	Rp854,938,000.00	Rp836,127,331.00	97.80%	58.12%	Efisien
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Tersusun	3	3	100.0%	Rp153,713,000.00	Rp151,040,173.00	98.26%	1.77%	Efisien

Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	4	400.0%	Rp231,054,000.00	Rp221,861,856.00	96.02%	316.57%	Efisien
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	2	2	100.0%	Rp470,171,000.00	Rp463,225,302.00	98.52%	1.50%	Efisien
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	100	100	100.0%	Rp595,003,000.00	Rp574,896,211.00	96.62%	3.50%	Efisien
	Cakupan pengadaan barang dan jasa	78	81,47	104,45%	Rp1,072,745,000.00	Rp1,064,346,198.00	99.22%	0.13%	Efisien
	Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	100	100	100.0%	Rp565,010,200.00	Rp505,338,900.00	89.44%	11.81%	Efisien
<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	100	100	100.0%	Rp278,270,200.00	Rp263,530,500.00	94.70%	5.59%	Efisien
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	3	100.0%	Rp86,511,200.00	Rp85,050,000.00	98.31%	1.72%	Efisien
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	2	100.0%	Rp148,369,000.00	Rp140,726,500.00	94.85%	5.43%	Efisien
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	2	100.0%	Rp43,390,000.00	Rp37,754,000.00	87.01%	14.93%	Efisien
<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Cakupan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam</b>	100	100	100.0%	Rp286,740,000.00	Rp241,808,400.00	84.33%	18.58%	Efisien
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	2	100.0%	Rp235,510,000.00	Rp195,621,000.00	83.06%	20.39%	Efisien
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	100.0%	Rp14,750,000.00	Rp13,773,400.00	93.38%	7.09%	Efisien
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	2	2	100.0%	Rp36,480,000.00	Rp32,414,000.00	88.85%	12.54%	Efisien
<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	100	100	100.0%	Rp595,003,000.00	Rp574,896,211.00	96.62%	3.50%	Efisien
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1	1	100.0%	Rp53,600,000.00	Rp53,031,180.00	98.94%	1.07%	Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	4	100.0%	Rp346,699,000.00	Rp337,576,570.00	97.37%	2.70%	Efisien
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	100.0%	Rp194,704,000.00	Rp184,288,461.00	94.65%	5.65%	Efisien
<b>Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	100	109.7	109.7%	Rp1,072,745,000.00	Rp1,064,346,198.00	99.22%	10.57%	Efisien

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1000	870	87.0%	Rp680,054,000.00	Rp674,856,948.00	99.24%	-12.33%	Tidak efisien (kinerja tidak tercapai)
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	12	100.0%	Rp112,981,000.00	Rp111,608,044.00	98.78%	1.23%	Efisien
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	370	540	145.9%	Rp279,710,000.00	Rp277,881,206.00	99.35%	46.91%	Efisien
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	100	100	100.0%	Rp500,881,000.00	Rp481,897,024.00	96.21%	3.94%	Efisien
<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	Prosentase Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	100	100	100.0%	Rp254,751,000.00	Rp249,047,534.00	97.76%	2.29%	Efisien
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Prosentase Kegiatan Monev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100.0%	Rp94,451,500.00	Rp85,008,357.00	90.00%	11.11%	Efisien
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	100	100	100.0%	Rp46,757,500.00	Rp44,730,362.00	95.66%	4.53%	Efisien
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kelembagaan dan Anjab yang dilaksanakan	100	100	100.0%	Rp104,921,000.00	Rp103,110,771.00	98.27%	1.76%	Efisien
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2	2	100.0%	Rp185,419,500.00	Rp180,713,230.00	97.46%	2.60%	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	100.0%	Rp69,331,500.00	Rp68,334,304.00	98.56%	1.46%	Efisien
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	2	2	100.0%	Rp94,451,500.00	Rp85,008,357.00	90.00%	11.11%	Efisien
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	1	1	100.0%	Rp46,757,500.00	Rp44,730,362.00	95.66%	4.53%	Efisien
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	4	100.0%	Rp104,921,000.00	Rp103,110,771.00	98.27%	1.76%	Efisien
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	100	100	100.0%	Rp850,000,000.00	Rp848,582,000.00	99.83%	0.17%	Efisien
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100.0%	Rp850,000,000.00	Rp848,582,000.00	99.83%	0.17%	Efisien
<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Terlaksananya Protokol, Kegiatan Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	100.0%	Rp3,749,047,500.00	Rp3,691,792,915.00	98.47%	1.55%	Efisien
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	100.0%	Rp96,466,000.00	Rp95,999,144.00	99.52%	0.49%	Efisien
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	100.0%	Rp2,869,940,000.00	Rp2,820,571,845.00	98.28%	1.75%	Efisien
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	100.0%	Rp782,641,500.00	Rp775,221,926.00	99.05%	0.96%	Efisien
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	100	100	100.0%	Rp4,599,047,500.00	Rp4,540,374,915.00	98.72%	1.29%	Efisien

	Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	100	100	100.0%	Rp51,777,416,200.00	Rp47,968,483,146.00	92.64%	7.94%	Efisien
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100.0%	105,350,000	101,767,600	96.60%	3.52%	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	2	100.0%	88,050,000	84,560,000	96.04%	4.13%	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	100.0%	4,100,000	4,080,000	99.51%	0.49%	Efisien
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1	100.0%	4,100,000	4,098,000	99.95%	0.05%	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	100.0%	5,000,000	4,929,800	98.60%	1.42%	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	100.0%	4,100,000	4,099,800	100.00%	0.00%	Impas
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100.0%	18,749,363,000	17,721,346,415	94.52%	5.80%	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	130	130	100.0%	17,996,613,000	16,988,377,267	94.40%	5.93%	Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100.0%	718,500,000	701,688,300	97.66%	2.40%	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100.0%	6,000,000	4,542,999	75.72%	32.07%	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	2	100.0%	24,150,000	22,749,400	94.20%	6.16%	Efisien
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	100.0%	4,100,000	3,988,449	97.28%	2.80%	Efisien
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100.0%	504,040,000	439,415,650	87.18%	14.71%	Efisien
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	8	8	100.0%	395,350,000	364,020,650	92.08%	8.61%	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	200	100.0%	56,150,000.00	37,301,000.00	66.43%	50.53%	Efisien
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100.0%	11,975,000	8,244,000	68.84%	45.26%	Efisien
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100.0%	40,565,000	29,850,000	73.59%	35.90%	Efisien
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100.0%	4,806,589,400	4,344,395,124	90.38%	10.64%	Efisien

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	100.0%	165,000,000	152,093,098	92.18%	8.49%	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100.0%	401,850,000	287,119,000	71.45%	39.96%	Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	100.0%	325,000,000	324,514,340	99.85%	0.15%	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	100.0%	1,935,289,400	1,681,421,548	86.88%	15.10%	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100.0%	100,000,000	98,506,395	98.51%	1.52%	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100.0%	116,000,000	114,680,000	98.86%	1.15%	Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30	100.0%	275,450,000	261,373,000	94.89%	5.39%	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700	700	100.0%	1,488,000,000	1,424,687,743	95.75%	4.44%	Efisien
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100.0%	10,167,050,400	9,689,358,102	95.30%	4.93%	Efisien
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	15	100.0%	7,240,358,000	6,894,949,998	95.23%	5.01%	Efisien
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	9	100.0%	2,926,692,400	2,794,408,104	95.48%	4.73%	Efisien
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.0%	7,580,945,400	6,936,526,140	91.50%	9.29%	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.0%	40,580,000	37,709,606	92.93%	7.61%	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.0%	2,735,000,000	2,363,501,008	86.42%	15.72%	Efisien
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100.0%	374,385,000	245,939,080	65.69%	52.23%	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100.0%	4,430,980,400	4,289,376,446	96.80%	3.30%	Efisien
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.0%	5,773,844,000	5,288,172,519	91.59%	9.18%	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2	100.0%	134,864,000	115,976,444	86.00%	16.29%	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	79	100.0%	1,675,450,000	1,665,584,889	99.41%	0.59%	Efisien

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	150	100.0%	1,390,030,000	1,171,959,614	84.31%	18.61%	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100.0%	1,653,150,000	1,548,413,537	93.66%	6.76%	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100.0%	920,350,000	786,238,035	85.43%	17.06%	Efisien
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Cakupan Pelayanan kinerja administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100	100	100.0%	1,348,258,000	1,243,090,700	92.20%	8.46%	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100.0%	893,258,000	819,134,737	91.70%	9.05%	Efisien
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100.0%	455,000,000	423,955,963	93.18%	7.32%	Efisien
<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100	100	100.0%	2,741,976,000	2,204,410,896	80.39%	24.39%	Efisien
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8	8	100.0%	1,611,866,000	1,424,326,139	88.37%	13.17%	Efisien
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8	8	100.0%	977,230,000	642,349,017	65.73%	52.13%	Efisien
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	8	100.0%	152,880,000	137,735,740	90.09%	11.00%	Efisien

## F. Capaian Indikator Kinerja

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.E.1**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024	Pengampu
					Target	Realisasi	Realisasi	
1 Tujuan		Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	85	86,37	86,04	Sekretariat Daerah
			Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	99,36	n/a	99,36	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	75	n/a	66,94	
1:01 Sasaran		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	121,21	101,01	Sekretariat Daerah
			Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	101,25	113,26	
			Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100	
1:01:01	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	97	150	100	
			Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100	110	100	
	4.01.02.201	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kajian/ Kebijakan yang disusun/ dievaluasi	Kebijakan	5	5	5	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.201.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3	3	3	
	4.01.02.201.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	3	3	
	4.01.02.201.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	Dokumen	4	4	4	
	4.01.02.204	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang di Tanda Tangani	Dokumen	10	12	10	Bagian Kesra
	4.01.02.204.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	12	10	
	4.01.02.202	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	
	4.01.02.202.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dokumen	12	12	12	
	4.01.02.202.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	4	3	Bagian Hukum
	4.01.02.202.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	5	4	5	
	4.01.02.203	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Fasilitasi dan koordinasi Hukum	%	97	150	100	
	4.01.02.203.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Tersusun	Dokumen	3	3	3	
	4.01.02.203.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	1	4	2	Sekretariat Daerah
	4.01.02.203.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	Dokumen	2	2	2	
1.1.2	04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Cakupan pengadaan barang dan jasa	nilai	78	81,47	77,49	
			Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100	100	100	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024	Pengampu
					Target	Realisasi	Realisasi	
	<b>4.01.03.201</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	%	100	100	100	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>
	4.01.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dok	3	3	3	
	4.01.03.201.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Lap	2	2	4	
	4.01.03.201.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dok	2	2	2	
	<b>4.01.03.204</b>	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Cakupan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam</b>	%	100	100	100	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
	4.01.03.204.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dok	2	2	3	
	4.01.03.204.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	1	2	
	4.01.03.204.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	Dokumen	2	2	2	
	<b>4.01.03.202</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	%	100	100	100	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
	4.01.03.202.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	dokumen	1	1	1	
	4.01.03.202.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	4	4	4	
	4.01.03.202.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	12	12	12	
	<b>4.01.03.203</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	%	100	109,7	108.26	<b>Bagian PBJ</b>
	4.01.03.203.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1000	870	837	
	4.01.03.203.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	12	12	
	4.01.03.203.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	370	540	522	
1:01:03	04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	%	100	100	100	<b>Sekretariat Daerah</b>
	4.01.03.01.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	Prosentase Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	%	100	100	100	<b>Bagian Organisasi</b>
			Prosentase Kegiatan Monev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%	100	100	100	
			Prosentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	%	100	100	100	
			Prosentase Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kelembagaan dan Anjab yang dilaksanakan	%	100	100	100	
	4.01.03.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen	2	2	2	
	4.01.03.01.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	dokumen	2	2	2	
	4.01.03.01.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	dokumen	2	2	2	
	4.01.03.01.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	laporan	1	1	1	
	4.01.03.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	4	4	4	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024	Pengampu
					Target	Realisasi	Realisasi	
	01.205	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	%	100	100	100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	100	
	01.214	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Terlaksananya Protokoler, Kegiatan Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	%	12	12	100	
	01.214.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	12	
	01.214.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	12	
	01.214.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12	12	
01.02 Sasaran		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	nilai	77	n/a	78,78	Sekretariat Daerah
1:02:01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100	100	100	
	4.01.01.201	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	Bagian Umum
	4.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2	2	2	
	4.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.0101.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.202	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	148	
	4.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	130	130	121	
	4.0101.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	12	12	
	4.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	
	4.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	dok	2	2	2	
	4.01.01.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok	12	12	12	
	4.01.01.205	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	paket	8	8	8	
	4.0101.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	200	200	200	
	4.01.01.205.04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	1	1	1	
	4.01.01.205.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1	1	1	
	4.01.01.206.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	3	
	4.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	
	4.01.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	3	3	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024	Pengampu
					Target	Realisasi	Realisasi	
	4.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	8	8	
	4.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	
	4.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	12	12	12	
	4.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	30	30	30	
	4.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	700	700	700	
	<b>4.01.01.207</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	15	15	173	
	4.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	9	9	
	<b>4.01.01.208</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	
	<b>4.01.01.209</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	2	
	4.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	79	79	79	
	4.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	150	150	2345	
	4.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2	
	4.01.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	3	
	<b>4.01.01.212.</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.212.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	8	
	4.01.01.212.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	8	
	4.01.01.212.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	8	
	<b>4.01.01.211</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Pelayanan kinerja administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.211.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	
	4.01.01.211.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	

## G. Penghargaan

Selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih, diantaranya:

### 1. Pengelolaan JDIH tingkat Provinsi

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah 100.3.3.1/115 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pemberian penghargaan JDIH terbaik, bertempat di Gedung Gradhika Bakti Praja Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis 15 Mei 2025. JDIH Kabupaten Sukoharjo yang dikelola oleh Bagian Hukum memperoleh penghargaan terbaik kesatu pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

**Gambar III.F.1**  
**Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber: Bagian Hukum*

2. Anugerah Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Hari Rabu 7 Januari 2026 Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo Meraih Terbaik ke-IV Anugerah Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Anugerah ini diserahkan langsung oleh Bupati Sukoharjo Ibu Etik Suryani, SE., MM dan diterima oleh Kepala Bagian Hukum Ibu Retno Widiyanti Budiningsih, SH.

**Gambar III.F.2**  
**Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik**



*Sumber: Bagian Hukum*

3. Anugerah Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 mendapat penghargaan dari Bupati Sukoharjo sebagai PPID Pelaksana Informatif Tahun 2025.

**Gambar III.F.3**  
**Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik**



*Sumber: Bagian PBJ*

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif.

Berdasarkan uraian dan beberapa data dari bab ke bab yang tersaji di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena sesuai dengan target yang telah ditetapkan dapat diukur dengan hasil kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dapat tercapai **107,49%** dengan kategori **Sangat Baik** dan Sasaran 2 tidak dapat diukur capaian kerjanya karena data tidak tersedia (n/a).

### **B. Saran**

Upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di masa mendatang antara lain:

- Bagian-bagian Setda meningkatkan pelaksanaan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan yang dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.
- Bagian-bagian Setda mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan kinerja, administrasi pemerintahan, dan pelayanan, sehingga kinerja Sekretariat Daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.
- Bagian-bagian Setda memperkuat kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja melalui penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan tujuan strategis Sekretariat Daerah, serta memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

☞ Sekretaris Daerah



*Abdul Haris Widodo*  
Abdul Haris Widodo